

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam lingkup keuangan negara. Salah satu perannya dalam keuangan negara adalah menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan. Salah satu fungsi dari anggaran tersebut adalah untuk pembangunan negara dan demi kesejahteraan masyarakat (Nuranisa, 2021).

Di Indonesia, terdapat berbagai macam jenis perpajakan yang diterapkan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi bangunan serta PMK Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Bangunan. PBB terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Kemudian sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, serta sektor Lainnya (P5L) yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Meskipun dalam wewenang Pemerintah Pusat, pada kenyataannya PBB sektor P5L masih belum maksimal dalam menjadi sumber pendapatan negara. Belum optimalnya pendapatan PBB sektor P5L dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Sisi pertama adalah Wajib Pajak sebagai pihak yang memberikan data terkait objek pajak dalam SPOP. Kemudian, sisi kedua adalah petugas pajak sebagai fiskus yang menangani administrasi perpajakan (Mukhlis, 2012).

Institut perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel menjadi hal yang sangat penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Dalam rangka pembentukan institut perpajakan tersebut diperlukan SDM berkompeten, profesional, berintegritas, serta mampu memanfaatkan teknologi sebagai sistem yang reliabel dan andal. Selain itu, proses bisnis yang sederhana serta peraturan berkepastian hukum yang adil dan jelas juga menjadi faktor penting lainnya dalam optimalisasi penerimaan pajak (Artono, 2021).

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh adanya salah satu permasalahan yang terjadi di lapangan berupa ketidakbenaran pengisian data terkait luas hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Kuningan (KPH K). Penulis membandingkan dua data sekunder¹ yang diperoleh dan menunjukkan hasil berupa perbedaan luas hutan yang sangat signifikan.

Di dalam SPPT tersebut terdapat informasi luas hutan sebesar 29.089.960 m². Luas wilayah tersebut berbeda dengan informasi yang ada di situs resmi milik KPH K yang di dalamnya disampaikan bahwa luas hutan sebesar 29.684,35 hektare

¹ Data pertama diperoleh dari KPP Pratama Cirebon Dua berupa SPPT KPH K tahun 2020 dan data kedua diperoleh melalui situs resmi KPH K (Perhutani, 2019)

atau 296.843.500 m². Jika dilakukan perbaikan, maka diperoleh PBB terutang yang harus dibayar menjadi lebih besar.

Atas identifikasi masalah di atas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap optimalisasi PBB sektor Perhutanan di KPP Pratama Cirebon Dua dengan objeknya adalah hutan tanaman yang dikuasai oleh KPH Perhutani K, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan mengaitkan teori dan landasan hukum dengan implementasinya di lapangan. Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir penulis yang berjudul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perhutanan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan dalam latar belakang, maka berikut adalah beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penulisan karya tulis ini:

1. Bagaimana pengawasan pengisian SPOP oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Cirebon Dua selama ini?
2. Langkah apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cirebon Dua dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan di sektor perhutanan?
3. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan di KPP Pratama Cirebon Dua?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah:

1. Mempelajari prosedur pengawasan pengisian SPOP oleh KPP Pratama Cirebon Dua dan menganalisa kesesuaian antara prosedur yang diterapkan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mendeskripsikan langkah-langkah yang telah diterapkan KPP Pratama Cirebon Dua dalam mengoptimalkan Pajak Bumi Bangunan di sektor perhutanan.
3. Menganalisa ketepatan antara langkah optimalisasi dengan Pajak Bumi Bangunan di sektor perhutanan yang berhasil ditagih.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan karya tulis ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterbatasan data yang penulis peroleh, analisis antara penerimaan Pajak Bumi Bangunan terealisasi berdasarkan SPOP yang diisi oleh Wajib Pajak dengan penerimaan berdasarkan data yang sebenarnya ada di lapangan hanya dalam kurun waktu 2019 hingga 2021.
2. Analisis penerimaan Pajak Bumi Bangunan hanya berfokus pada sektor perhutanan dengan KPH K sebagai objeknya.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, di antaranya:

1. Penulis berharap karya tulis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi KPP Pratama Cirebon Dua dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan.
2. Karya tulis ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan referensi bagi KPP Pratama di wilayah lain dan penelitian lain yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Bumi Bangunan sektor P5L.

1.6 Metode pengumpulan data

Penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data dalam penulisan karya tulis ini, di antaranya:

1. Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis mengambil dan mengolah teori-teori yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, artikel, situs internet, peraturan perundang-undangan, hingga laporan PKL.

Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data melalui studi penelitian terhadap karya buku, literatur, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan (Nazir, 1988).

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu proses pengambilan data dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan cara sistematis, logis, objektif, dan rasional terkait suatu kejadian, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin, 2011, dalam Rahmah, 2021).

Metode ini tidak dapat penulis lakukan seperti pengambilan data secara langsung melalui survei lapangan. Hal tersebut dikarenakan surat survei yang telah penulis ajukan tidak terbit sampai dengan karya tulis ini dibuat. Adapun pengganti surat survei yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah proposal karya tulis ini, sehingga data tetap bisa didapatkan tanpa melakukan survei lapangan.

3. Wawancara

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber terpercaya untuk memperoleh data dan informasi. Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan dalam kegiatan tertentu untuk tujuan mendapatkan informasi dan mendidik responden secara lisan dengan maksud melakukan aktivitas komunikasi secara langsung (Koentjoroningrat, 1997, dalam Zakky, 2020).

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi tentang gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam karya tulis ini. Pada bab pertama ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi tentang penjabaran teori-teori yang akan digunakan dalam pembahasan. Teori-teori yang digunakan mengacu pada permasalahan yang akan diangkat dalam karya tulis, seperti pengertian PBB sektor P5L, analisis optimalisasi pajak, sistematisasi pengawasan pengisian SPOP, dan sebagainya.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab tiga berisi tentang pembahasan atas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis serta metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang analisis penyebab perbedaan informasi data dalam SPOP dengan data yang sebenarnya ada di lapangan. Komaruddin (2001, dalam Novitasari, 2021) menyatakan bahwa analisis merupakan kegiatan berpikir dengan tujuan menjabarkan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, serta fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu dapat teridentifikasi.

Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cirebon Dua dalam mengoptimalkan Pajak Bumi Bangunan sektor P5L.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab empat berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisis, pengamatan, dan penilitan data yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya